

**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KUANSING OLEH DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Rilly Yahdini

Rilly.yahdini76@gmail.com

Pembimbing : Ernawati

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The phenomenon identified by researchers in the research of the Kuansing Library Management by the Library and Archives Service of Kuantan Singingi District did not meet the national library standards, namely the absence of technology-based information network services; limited human resources in managing libraries; and the lack of infrastructure. This study aims to determine and analyze library management and the inhibiting factors of Kuansing library management by the Library and Archives Service of Kuantan Singingi Regency. In this study using the theory of George R. Terry in the Hasibuan 2017 management function to analyze the Management of the Kuansing Library by the Library and Archives Service of Kuantan Singingi Regency. This theory consists of Planning, Organizing, Actuating, Controlling. This type of research uses qualitative methods with data collection techniques for interviewing, observation, and documentation. Based on the results of the study it is known that the Management of the Kuansing Library by the Library and Archives Service of Kuantan Singingi Regency has not been optimal in terms of Planning, organizing, implementing and monitoring. Inhibiting factors for the management of the Kuansing Library by the Library and Archives Office of Kuantan Singingi Regency are facilities and infrastructure, the absence of regulations and budget constraints.

Keywords: Management, Library, Archives, Standards, National

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan Kabupaten/kota merupakan perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota. Maka, perpustakaan yang di bentuk oleh pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan setiap penggunaannya dan berperan aktif dalam menyediakan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan setiap pengguna sesuai sistem standarisasi perpustakaan secara nasional. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 48 ayat 2, bahwa *“pemerintah menetapkan sistem standarisasi perpustakaan secara yang meliputi kegiatan pengembangan standar teknis, penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi, serta kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan lainnya”*. Tujuan pemerintah dalam menetapkan standarisasi perpustakaan secara akreditasi dan sertifikasi agar sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pembangunan perpustakaan. Oleh karena itu perpustakaan memiliki nilai yang cukup signifikan untuk menaikkan standar lembaga sehingga perpustakaan harus mendapatkan ruang dan perhatian dari komponen pimpinan di lembaga agar tercapai nilai akreditasi seperti yang optimal.

Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, 7 perpustakaan umum daerah Kabupaten/kota yang sudah

terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI yakni Siak, Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Bengkalis dan Pelalawan dengan predikat akreditasi yang bervariasi, Sedangkan 5 (lima) perpustakaan lainnya belum terakreditasi dari Perpustakaan Nasional RI termasuk Kuantan Singingi. Standar Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan perpustakaan umum Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan umum Kabupaten/kota. Standar ini merupakan hasil amanat dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 11 yaitu Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas: standar koleksi perpustakaan, standar sarana prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan terbentuknya lembaga ini antara lain sebagai salah satu wadah pendidikan yang sangat penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia bagi masyarakat umum.

Dalam hal ini pemerintah yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi Arsip sebagai lembaga penyedia layanan perpustakaan umum sekaligus pengelola informasi memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pelayanan informasi

terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang secara administratif berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini tentu harus merumuskan kegiatan guna meningkatkan kualitas baik dari segi sarana dan prasarana serta pelayanan yang diberikan kepada pengguna/masyarakat sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat, dan masyarakat tidak lagi memandang perpustakaan sebagai tempat yang membosankan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi oleh yaitu:

Pertama, tidak adanya perkembangan dalam sistem layanan jaringan informasi berbasis teknologi seperti perpustakaan digital di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya akses informasi yang dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat. Bahwa permasalahan yang terjadi adalah pada segi teknik perencanaan itu sendiri.

Kedua, Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga fungsional perpustakaan atau tenaga profesional yang memiliki kualifikasi ahli dengan latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan minimal D3 untuk ditingkat terampil dan S1 untuk tingkat ahli, atau berpengalaman lama mengelola perpustakaan secara profesional. Adapun jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok Pustakawan Tingkat Terampil (PTT) dan kelompok Pustakawan Tingkat Ahli (PTA).

Ketiga Minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan

di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada masyarakat sebagai pengguna perpustakaan. Dalam bagian ini, tidak akan diuraikan seluruh sarana maupun prasarana yang ada, namun hanya terbatas mengindikasikan sarana dan prasarana yang paling banyak berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas rutin dalam bidang perpustakaan di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi dan rangsangan pada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi khususnya rangka pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dalam meningkatkan sumber daya manusia dan menjaga sejarah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Bagi masyarakat, dapat sebagai informasi untuk mengetahui Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agree* (melakukan), yang telah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa latin) yang berarti melatih.

Hasibuan (2017:1) Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen atau Pengelolaan berarti menyelenggarakan. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja mencapai tujuan tertentu.

Hasibuan (2017:37) Manajemen oleh para penulis dibagi atas beberapa fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :

Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (**Hasibuan 2017:40**). Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada (**Koonts and Donnel dalam Hasibuan**). Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (**Hasibuan 2017:40**). Pengorganisasian adalah tindakan

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (**Terry dalam Hasibuan 2017:40**)

3. *Actuating*, (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan (**Hasibuan 2017:41**). Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (**Terry dalam Hasibuan 2017:41**)
4. *Controlling*, (Pengendalian) adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (**Strong dalam Hasibuan 2017:41**) Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara (**Koontz dalam Hasibuan 2017:41**)

2.2 Manajemen Perpustakaan

Menurut **Sutarno (2006:20)** dalam bukunya Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik, menjelaskan bahwa “Manajemen Perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip manajemen.

2.3 Arsip

Secara etimologi kata arsip berasal dari bahasa Yunani (*Greek*), yaitu *archium* yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula pengertian arsip itu memang menunjukkan tempat atau gedung tempat penyimpanan arsipnya, tetapi perkembangan terakhir orang lebih cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu sendiri. Schollenberg menggunakan istilah *archives* sebagai kumpulan warkat itu sendiri, dan *archives instution* sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan. (**Tjandra; 2008:286**)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus disini yaitu peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu permasalahan, yaitu pengelolaan perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi tepatnya berada di Kantor Bupati Kuansing, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).

Ada pun key informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi
2. Kepala Bidang Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten

Dan yang menjadi informan penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi
2. Kasubag Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Kasubag Program dan Keuangan
4. Kepala Bidang Kearsipan
5. Petugas Pelayanan Perpustakaan (Staf)

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam tentang informasi yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

1. Hasil dari wawancara dengan pihak terkait mengenai permasalahan pengelolaan perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi
2. Observasi yang dilakukan penulis dilapangan mengenai permasalahan yang terjadi pengelolaan perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi (data yang sudah dibuhkan dan

dipublikasikan) yang di peroleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media maasa, dan sumber lainnya yang relevann dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini seperti :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi di sini yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang di teliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi Observasi dilakukan dari 25 Mei 2018 sampai dengan 20 Desember 2018

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara

tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara dilakukan dari 31 Desember 2018 sampai dengan 10 Februari 2019.

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa profil, foto-foto mediasi, Dokumentasi dilakukan dari 31 Desember 2018 sampai dengan 10 Februari 2019.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Data Collection (Pengumpulan Data) Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih dan jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik

seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu

Data Display (Penyajian data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan) Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Perencanaan (Planning)

Perencanaan dalam pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Kuantan Singingi maka pemerintah daerah membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga penyedia layanan perpustakaan daerah sekaligus pengelola informasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang secara administratif berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil wawancara pada perencanaan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi membuat perencanaan dalam rangka untuk pengembangan dan pengelolaan terhadap Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan disini tidak lain merupakan kegiatan untuk penyusunan rencana kerja dan menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Indikator mengenai perencanaan dalam pengelolaan perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu penetapan tujuan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan, kebijakan, prosedur dan program.

4.1.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan terbentuknya lembaga ini antara lain sebagai salah satu wadah pendidikan yang sangat penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia bagi masyarakat umum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki keinginan

dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat melalui lembaga perpustakaan, hal ini dilakukan atas dasar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah diamanatkan untuk membuat perencanaan pembangunan sesuai bidang dan tupoksinya. Namun demikian dukungan atas penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan lembaga perpustakaan dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi kurang mendapat sambutan yang baik artinya bahwa Pemerintahan Daerah dalam hal penyelenggaraan pembangunan memiliki fokus lain yaitu menekankan pada pembangunan fisik (infrastruktur), dikarenakan lemahnya perhatian aparat pemerintah terhadap masalah perpustakaan, yang berakibat sarana pendidikan non formal seperti perpustakaan kurang maksimal dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat.

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah saling mendukung dan membantu baik dalam segi pembinaan Sumber Daya Manusia, ataupun bantuan-bantuan sarana prasarana. Meski demikian ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa di campuri satu sama lain. Namun dalam hal atau bidang yang sama seperti pembinaan pengelolaan perpustakaan tentu saling berkoordinasi, atau saling memberikan peran sesuai tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, dalam hal ini mengenai pengelolaan perpustakaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mematuhi adanya kesatuan perintah atau mengintegrasikan unsur-unsur pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan terkait sarana pendidikan non formal seperti perpustakaan.

4.1.3 Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan dalam Pengelolaan

Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi pembinaan dan bimbingan, saran ataupun perintah dari pimpinan kepada segala perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam melakukan pengarahan kepada bawahannya, pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan rapat kerja sebagai sarana komunikasi yang dianggap cukup efektif dalam menyampaikan arahan-arahan kepada bawahannya, sehingga diharapkan dapat terjalannya kerja sama yang sinergis. Sementara terkait upaya organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengarahan ke perpustakaan sekolah maupun desa adalah dengan melalui program kerja yaitu Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang salah satu kegiatannya adalah melakukan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

Proses pengarahan selalu dilakukan dalam rapat koordinasi, dari masing-masing unit diberikan arahan sesuai dengan tupoksi, sehingga seluruh komponen organisasi dalam lingkup kerja dapat terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dari masing-masing unit kerja.

Dalam lingkup internal sebelum melakukan kegiatan dari suatu program di bidang perpustakaan, selalu diawali dengan rapat persiapan, rapat kerja, maupun juga rapat koordinasi baik secara

keseluruhan komponen organisasi maupun secara berjenjang sesuai dengan skala hirarkinya. Hal itu dilakukan guna menentukan pilihan-pilihan alternatif terbaik dari sekian banyaknya pilihan-pilihan yang ada, mengambil keputusan, mempersiapkan anggaran serta sumber daya pendukung lainnya. Sehingga dalam hal ini pemberian arahan adalah untuk memberitahukan bawahan agar dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang didasari juga pada pengoptimalan sumber daya yang dimiliki. Selain itu hal yang dilakukan dalam lingkup eksternalnya adalah dengan melakukan supervisi, pembinaan dan pengembangan perpustakaan-perpustakaan di tingkat Kecamatan ataupun Desa serta sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kuansing yang tujuannya adalah menegakkan kerja sama atas dasar kesederajatan terhadap posisi dan tugas dengan prinsip integritas.

4.1.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, karena merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa ini dikelola langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi melalui UPTD Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi. Petugas khusus pelayanan perpustakaan (staf) Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi langsung diawasi dan dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengontrol pelayanan perpustakaan. Dalam melakukan pengawasan terhadap

perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengawasan berdasarkan wawancara penulis terkait seperti apa pola pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan (staf) dari pengelolaan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses pelaporan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi biasa dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan dalam lingkungan internal dan eksternal. Dilingkungan internal pelaporan secara lisan dilakukan melalui rapat persiapan (pengawasan sistem) tujuannya adalah supaya proses penyelenggaraan berjalan sesuai rencana dengan menentukan semua aspek yang menjadi kebutuhan, selanjutnya dilakukan rapat evaluasi kinerja dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari semua proses penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, sehingga dapat diketahui dan diperbaiki atau dilakukan evaluasi. Adapun pengawasan yang dilakukan dilingkungan eksternalnya adalah melalui pengawasan reguler yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kunasing (inspektorat) dari Pemerintah Daerah melalui laporan tertulis berupa data-data.

5.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.1 Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai

Mengenai fasilitas/sarana dan prasarana di atas dapat disimpulkan bahwa, ketersediaan sumber daya sarana

dan prasarana di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum memenuhi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat secara umum. Jika dilihat fungsi dan Standar Nasional dari perpustakaan umum itu sendiri, maka Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi harus menyediakan sarana atau fasilitas bagi kebutuhan masyarakat secara umum tidak terkecuali. Namun yang terjadi dalam hal ini justru ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat terbatas dari segi gedung yang tidak memiliki kapasitas atau daya tampung yang memadai baik ruang baca, ruang kerja; lokasi yang tidak strategis bagi lingkungan masyarakat secara umum; terbatasnya bahan pustaka baik tercetak maupun terekam atau juga sarana baca bagi penyandang tuna netra (buku braille) yang tidak tersedia, tidak tersedianya fasilitas untuk operasional teknologi seperti ruang audio visual, perpustakaan digital, serta terbatasnya armada perpustakaan keliling.

5.2.2 Tidak Adanya Regulasi

Jika mengacu pada Undang-undang Perpustakaan terkait pengembangan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, memang belum terlaksana. Hal ini berkenaan sarana yang terbatas, serta anggaran yang disediakan pun belum memenuhi kebutuhan ke arah itu, selain itu juga Pemda Kab. Kabupaten Kuantan Singingi belum membuat regulasi terkait penyelenggaraan perpustakaan berbasis teknologi tersebut di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.. Tapi pada prinsipnya kami sejauh ini terus berusaha patuhi aturannya, dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, tinggal seperti apa pencapaiannya. Jika bicara kenyataan yang

dihadapi, mengalami kendala seperti terbatasnya anggaran, tenaga fungsional pustakawan, serta sarana dan prasarana. Sehingga berdampak pada pelayanan yang memang kurang maksimal kepada masyarakat.

5.2.3 Keterbatasan Anggaran

Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pusat pelayanan informasi bagi masyarakat umum memerlukan banyak perhatian pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi yang saat ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki keterbatasan anggaran dan personil baik untuk pengembangan dan perawatannya. Untuk menutupi keterbatasan anggaran ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah merencanakan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Anggaran kita setiap tahunnya berasal dari APBD ya, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum memprioritaskan pembangunan Perpustakaan, seharusnya dari APBD menyisihkan 50% untuk pembangunan perpustakaan. Dan semua kegiatan di kantor, semua kebutuhan kantor seperti untuk alat-alat tulis kantor, listrik, pengadaan barang dan untuk TKK terkait gajinya maupun kegiatan dibidang perpustakaan seperti biaya bahan bakar untuk pusling, pameran, lomba-lomba, pengadaan buku dan sarana penunjang lain untuk perpustakaan itu semua dananya dari APBD.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal dari segi penetapan tujuan, Perencanaan kebijakan, Perencanaan Prosedur dan Perencanaan program, sehingga dalam pengelolaan perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi Belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pengorganisasian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pengelola langsung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik dalam organisasi perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi banyak kekurangan tenaga ahli perpustakaan Fungsional dan Profesional perpustakaan, dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta tata kerja. Pelaksanaan atau Pergerakan meliputi keterbatasan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga fasilitas pelayanan jaringan informasi berbasis teknologi (e-book, e-journey), minimnya sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi dan terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan yang tidak adanya tenaga fungsional perpustakaan atau tenaga profesional, yang ada hanya dana untuk perawatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan dalam Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi pengawasan secara langsung kepada petugas pelayanan khusus perpustakaan dan kearsipan masih ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan seperti sarana kerja, anggaran kegiatan yang sangat minim sehingga tidak terealisasikan

secara maksimal.

Faktor-faktor penghambat pengelolaan Perpustakaan Kuansing oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi hambatan dalam pengelolaan perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tidak adanya regulasi baik itu Peraturan Daerah atau Keputusan Pemerintah Pusat yang mengatur pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi (digital).

3. Keterbatasan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengembangkan perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016-2018.

6.2 Saran

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pengelola sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia, pegawai dan staf untuk di tugaskan sebagai tenaga fungsional dan profesional dalam pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi, perlu adanya bimbingan teknis mengenai tenaga yang mengelola perpustakaan. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan perpustakaan Kuansing, agar masyarakat nyaman dan masyarakat pun akan semakin ramai untuk berkunjung ke Perpustakaan Kuansing sebagai Pusat pelayanan penyediaan ilmu dan informasi agar sesuai dengan Standar nasional perpustakaan Kabupaten/kota yang telah

ditetapkan Perpustakaan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah seharusnya menetapkan Regulasi mengenai pelayanan informasi berbasis teknologi untuk Perpustakaan Kuansing agar adanya pedoman teknis terkait penyelenggaraan perpustakaan Digital. Hingga perencanaan mengenai peprustakaan berbasis teknologi dapat dilaksanakan sesuai prosedur Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/kota. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi dan Mengusahakan anggaran dari APBD untuk Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyediakan Pelayanan, sarana dan prasarana dan dalam mengelola perpustakaan Kuansing.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusup, M. Pawit. 2016. Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Keperpustakaan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Press
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen, Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, H. Melayu S.P. 2017. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hermawan S, Rachman dan Zen, Zulfikar. 2006. Etika Kepustakawanan, Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- HS, Lasa. 2007. Manajemen Perpustakaan Sekolah. Yogyakarta : Pinus.
- Irawan, Prasetya. 2005. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. DIA FISIP UI.

- Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. DIA FISIP UI.
- Mulyana, Deddy. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- NS, Sutarno. 2006. Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Group.
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta : Alfabeta
- Terry, George. R. dan Leslie W. Rue, 2016. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Terry, George. R, 2016. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ritonga, Danil Akhmad. 2006. Peranan Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang Bagi Masyarakat. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Dokumen :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Penelitian Terdahulu :**
- Safriadi, 2018. Manajemen Kearsipan pada UPT Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Skripsi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru
- Rahmi Novita, 2018. Pengelolaan Arsip Statis Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara : hlm. 18-28.
- Andi Ibrahim, 2014. Konsep Dasar Manajemen Perpustakaan dalam Mewujudkan Mutu Layanan Prima dengan Sistem Temu Kembali Informasi Berbasis Digital. Makassar: Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah. Vol. 2 No. 2, hlm. 129-138.
- Rinas Ariska, 2017. Pengembangan Kapasitas Pemerintah: Studi di Perpustakaan Umum Daerah “Rumah Baca Hafrita Dara” Kabupaten Siak Tahun 2015-2016. Pekanbaru: JOM FISIP Vol. 4 No.1 Februari 2017